



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id
TARAKAN (77121)

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 4 LANGKAH 5 TAHUN
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) TA 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN**

1. DATA GENDER

Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di usia 0-14 tahun, maka beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar. Capaian Kinerja *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2024 sebesar 2.27 lebih tinggi 0.03 poin dari target 2.24. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 Tahun). Capaian sebesar 2.27 menunjukkan bahwa di Kota Tarakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya adalah 2 anak. Untuk Tahun 2025 DPPPAPKB Kota Tarakan menetapkan target TFR sebesar 2.24 sesuai Rensta DP3APKB Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas maka dapat diidentifikasi isu gender yaitu :

1. Kurangnya kesadaran tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia bagi akseptor serta kurangnya pengetahuan tentang cara kerja, efektivitas dan efek sampingnya
2. Masih adanya stigma sosial terhadap pemakaian kontrasepsi atau budaya yang mendukung peran tradisional gender dalam pengendalian kelahiran bisa menjadi penghalang bagi akseptor untuk menggunakan kontrasepsi.

3. Kurangnya SDM petugas lapangan penyuluh KB (PLKB) yang seharusnya 1 PLKB mengampu 1 kelurahan, sedangkan di Samarinda PLKB bisa 2-3 kelurahan.

2. FAKTOR PENYEBAB

A. PENYEBAB LANGSUNG

1. Akses :
 - a. Aksesibilitas akseptor dalam meningkatkan wawasan mengenai metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada terbatas.
2. Partisipasi
 - a. Partisipasi akseptor dalam mendapatkan Pengetahuan MKJP belum optimal
 - b. Partisipasi akseptor pria dalam keikut sertaan pelayanan menggunakan MKJP masih rendah
3. Kontrol
 - a. Kewenangan dalam mendapatkan pengambilan keputusan dalam penggunaan MKJP masih rendah.
4. Manfaat :
 - a. Belum semua akseptor mendapatkan manfaat dari penggunaan MKJP.
5. Stereotipe : Adanya pelabelan bahwa perempuan yang harus menggunakan alat kontrasepsi
6. Budaya: Stigma sosial terhadap pemakaian kontrasepsi atau budaya yang mendukung peran tradisional gender dalam pengendalian kelahiran bisa menjadi penghalang bagi akseptor untuk menggunakan kontrasepsi.

B. TIDAK LANGSUNG :

1. SDM : Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLKB) yang seharusnya 1 PLKB mengampu 1 Kelurahan, sedangkan di Kota Tarakan PLKB bisa 2-3 kelurahan.
2. Regulasi : tidak adanya perda yang mengatur tentang MKJP
3. Data : Sebagian data OPD belum responsive gender, pemahaman internal OPD terhadap perhitungan data outcome pencapaian KB masih rendah dan sangat tergantung pada BKKBN.
4. Mekanisme koordinasi internal dan lintas OPD : Koordinasi antar OPD dalam PUG belum optimal

3. RENCANA AKSI

A. KERANGKA KERJA

SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAMPAK	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persentase masyarakat terpapar program Bangga Kencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	

B. RENCANA AKSI

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi Tahun 2025-2029												
						Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)				
						Kinerja	Indikator	Satuan	2025	2006	2007	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									1.987.717.150,00	766.048.300,00	766.048.300,00	766.048.300,00	766.048.300,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat terpapar program Bangga Kencana (%)	persentase	61,15	61,50	62,15	62,50	63,00	1.118.546.000,00	400.632.350,00	400.632.350,00	400.632.350,00	400.632.350,00

							Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	persentase										
									13, 60	13, 00	12, 60	12, 00	11, 60					
2	1 4	0 3	2.0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan KB	layanan	1,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	542.123.500, 00	210.000.00 0,00	210.000.00 0,00	210.000.00 0,00	210.000.00 0,00
2	1 4	0 3	2.0 3	000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	1.4 29	593	593	593	593	476.222.000, 00	50.000.000, 00	50.000.000, 00	50.000.000, 00	50.000.000, 00

Rencana aksi:

1. Melakukan sosialisasi terkait metode kontrasepsi untuk akseptor
2. Melakukan pendekatan dan pendataan terhadap calon akseptor
3. Tindak lanjut pelaksanaan MKJP

CROSSCUTTING OPD

1. DINKES
2. RSUD TARAKAN
3. RSUKT
4. RS PERTAMINA
5. BKKBN